**Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pelalawan**

## Amria,\*, Rina Novia Yantib,\*, Anto Ariyanto c,\*

Prodi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana

Universitas Lancang Kuning, Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ABSTRACT** |  | **ARTICLE HISTORY** |
| Excessive exploitation of natural resources can damage and reduce environmental quality. The high pollutant load reduces the carrying capacity and capacity of the environment which ultimately reduces the quality of life of the community itself. The formulation of regional innovations in environmental management has not been structured systematically and is still partial for the benefit of each government agency in Pelalawan Regency. Apart from that, the effectiveness of each of these innovations needs to be researched further as input for future improvements in these innovations. Research activities were carried out using survey methods, namely by conducting observations and interviews in the field for parameters in 3 sub-districts in Pelalawan Regency. Apart from that, this research is also supported by secondary data to analyze survey results in the field and create policy directions regarding the studies carried out. Environmental problems in Pelalawan Regency are generally related to land conversion, flooding, abrasion and sedimentation as well as river silting and environmental management that has been carried out in Pelalawan Regency related to these problems has been carried out with various regulations and arrangements carried out by Pelalawan Regency Environmental Service. Regional innovations in overcoming problems in environmental management in Pelalawan Regency consist of innovations by the regional government in improving services and ease of permits, building wells, while innovations from the community are in the form of palm oil palm blade sharpening machines, while those from the private sector with their CSR programs starting from the Fire Free Village , Proklim and so on. The success of these innovations in overcoming environmental problems in Pelalawan Regency has been seen and felt by the community both in relation to government programs and those that have been carried out by the community, but quantitatively it is still less than other districts. |  | Received 23 Maret 2014  Revised 25 Maret 2024  Accepted 28 Maret 2024 |
|  |
| **KEYWORDS**  Environment inovation, ecological aspect, economic aspect, social aspect |

# Pendahuluan

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan pesatnya pembangunan, meningkatnya populasi penduduk, dan berkembangnya teknologi yang berdampak pada tingginya kebutuhan akan barang dan jasa akan menyebabkan meningkatnya kuantitas produksi. Peningkatan kuantitas produksi berdampak pada peningkatan eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak dan menurunkan kualitas lingkungan. Tingginya beban pencemar menurunkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup masyarakat sendiri.

Kerusakan lingkungan di Kabupaten Pelalawan menyebabkan terjadinya kekeringan di beberapa lokasi (Hernaningsih, 2016). Selain kekeringan juga terjadi kebakaran hutan di lahan gambut dan non gambut di Kabupaten Pelalawan (Nurhayati et al, 2022). Bencana banjir juga dialami oleh masyarakat di Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan (Septiawan, 2022).

Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan berbagai upaya pengelolaan lingkungan sebagai bentuk kesadaran lingkungan dan respons akibat permasalahan lingkungan yang terjadi dan dikembangkan dalam sebuah sistem informasi lingkungan hidup sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 62 ayat 1-3, yang menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Kabupaten Pelalawan sudah melakukan dan melaksanakan inovasi daerah berupa kebijakan dan kegiatan yang dihasilkan melalui kolaborasi dengan masyarakat, Lembaga Non Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah.

Perumusan inovasi-inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup belum tersusun secara sistematis dan masih bersifat parsial untuk kepentingan setiap instansi pemerintah di Kabupaten Pelalawan. Selain itu efektivitas masing-masing inovasi ini perlu diteliti lebih lanjut sebagai bahan masukan kedepan untuk perbaikan inovasi tersebut.

Tujuan inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

1. Menganalisis permasalahan-permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan di Kabupaten Pelalawan.
2. Menganalisis inovasi-inovasi daerah dalam menanggulangi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan.
3. Menganalisis sejauhmana keberhasilan inovasi-inovasi tersebut dalam menanggulangi permasalahan-permsalahan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lainnya di samping untuk memenuhi kewajibannya, juga untuk mengetahui tingkat efektifitas dari pengelolaan lingkungan yang telah berjalan. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisir dampak turunan yang mungkin terjadi akibat tidak terkelolanya dengan baik kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

1. Bagi pemerintah

Digunakan sebagai bahan evaluasi atas ketaatan/ketidaktaatan pemegang izin lingkungan terhadap kewajibannya. Dengan demikian maka dokumen pelaporan pengelolaan lingkungan ini nantinya akan dapat berfungsi sebagai media bagi instansi terkait sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pelestarian lingkungan atas usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan.

1. Bagi masyarakat

Adapun fungsi dokumen pengelolaan lingkungan bagi masyarakat adalah sebagai media kontrol terhadap dampak lingkungan yang diterima oleh masyarakat yang termasuk dalam batas wilayah studi guna memastikan bahwa pemrakarsa melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

# Metode Penelitian

**Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu kegiatan penelitian ini dilakukan dari Bulan Mei 2023 sampai dengan November 2023. Lokasi studi dengan batasan yaitu kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Pelalawan yaitu Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Bandar Sekijang.

Kegiatan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei, yakni dengan melakukan pengamatan dan wawancara di lapangan untuk parameter di 3 kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh data-data sekunder untuk menganalisis hasil survey di lapangan dan membuat arah kebijakan tentang kajian yang dilakukan.

**Ruang Lingkup Wilayah Studi**

Secara umum beberapa tahapan dalam pelaksanaan kajian yaitu:

1. Persiapan, kegiatan awal untuk mendukung survei data primer dengan memperhatikan beberapa stasiun pengamatan sehingga dapat terwakili daerah kajian.
2. *Ground check* (turun lapangan) dalam rangka memperoleh data primer baik ekologi, ekonomi dan sosial budaya.
3. Analisis data, Beberapa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah meliputi Inventarisasi dan pengumpulan data/bahan referensi.

**Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (*interview),* kuesioner, dan dokumentasi yang dilakukan di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.

**Pendekatan Penelitian**

Secara metodologis, rancang bangun kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method*, dimana pendekatan kuantitatif menjadi data pembuka dan berfungsi untuk menopang/menguatkan data dan informasi yang diperoleh dengan pendekatan kualitatif (Brannen, 2005).

**Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah analisis data dilakukan berdasarkan data hasil wawancara dengan pengelola lingkungan hidup diperkuat dengan hasil observasi, wawancara dan kuisioner kemudian dibandingkan menggunanakan analisis deskriptif. Untuk menganalisis pendapat dan persepsi individu dan kelompok dalam masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup.

# Pembahasan

**Kondisi Umum Kabupaten Pelalawan**

Luas wilayah Kabupaten Pelalawan kurang lebih 13.427,96 km² atau 1.342.796 Ha. Secara administrasi Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan, 118 desa/kelurahan, 679 RW dan 2.000 RT. Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur Pulau Sumatera antara 00°48’32” Lintang Utara sampai 00°24’14” Lintang Selatan dan antara 101°30’40” Bujur Timur sampai 103°23’22” Bujur Timur. Ketinggian yang diidentifikasikan dengan garis kontur selang 25 meter, dari yang terendah 25 m dpl (di atas permukaan laut) hingga yang tertinggi 175 m dpl. Selain sungai utama yaitu Sungai Kampar, terdapat juga anak-anak sungai, antara lain: Sungai Kampar Kiri, Sungai Segati, Sungai Nilo, Sungai Kerumutan (yang mengalir dari arah selatan Sungai Kampar), serta Sungai Pelalawan, Sungai Selampaya, dan Sungai Serkap (yang mengalir dari arah utara Sungai Kampar).

Klasifikasi kelerengan wilayah Kabupaten Pelalawan terdiri atas: Kelerengan 0% – 2%, bagian wilayah dengan kelerengan 0 – 2 % dominan terletak pada ketinggian antara 0 – 50 meter dpl, yang terdapat di semua wilayah kecamatan. Sebaran jenis tanah di Kabupaten Pelalawan adalah histosol,entisol, inceptisol, ultisol, dan oxisol. Selama periode 2016-2020, curah hujan di Kabupaten Pelalawan berkisar antara 1.816 mm/tahun – 2.269 mm/tahun, dimana curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Pelalawan ini terkategori normal.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan terus mengalami peningkatan yaitu dari 396.990 jiwa pada tahun 2015, meningkat menjadi 483.622 jiwa pada tahun 2019. Selama periode 2010 – 2019, rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Pelalawan meningkat sebesar 6,71% per tahun. Rata-rata pertumbuhan ini adalah yang terbesar bila dibanding dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten/Kota sekitarnya.

**Permasalahan-permasalahan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Telah Dilakukan Di Kabupaten Pelalawan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan didapatkan isu-isu strategis.

**Tabel 1. Isu- isu stategis pengelolaan lingkungan hidup**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Isu-isu strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup | | | |
| Pesisir | Hutan | Perkotaan | Sungai dan danau |
|  | Abrasi pantai | Kebakaran hutan | Sampah | Penurunan kualitas air |
|  | Banjir | Alih fungsi lahan | Alih fungsi lahan | Sampah yang dibuang ke sungai |
|  | Sedimentasi |  | Sanitasi | Pencemaran sungai |
|  |  |  | Air bersih | Pendangkalan sungai |

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa masing-masing isu pada beberapa lokasi ada yang sama dan ada yang berbeda. Isu alih fungsi lahan ditemukan pada lokasi hutan dan perkotaan sedangkan isu banjir ditemukan pada kawasan pesisir dan sungai. Secara umum kebijakan pengelolaan lingkungan hidup diatur berdasarkan UU Cipta Lapangan Kerja dan peraturan pemerintah di bawahnya. Program unggulan Provinsi Riau yaitu Riau Hijau menjadi program andalan Provinsi Riau dan Pelalawan Sejuk menjadi program andalan Kabupaten Pelalawan. Peran Lembaga dalam pengelolaan lingkungan hidup bervariasi mulai dari level kebijakan dan aturan sampai implementasi di lapangan. Tapi masing-masing perlu merumuskan fungsi masing-masing lembaga dalam pengelolaan lingkungan hidup.

**Tabel 2. Permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup**

|  |  |
| --- | --- |
| No | Permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup |
|  | kemarau panjang, Cuaca tidak mendukung, Keadaan alam tidak menentu |
|  | Aktivitas sumberdaya ekonomi masyarakat harus membatasi atau dibatasi |
|  | Keterbatasan SDA |
|  | Alih fungsi lahan masalah persampahan |
|  | Kebakaran hutan |

Pembangunan yang kita lakukan seringkali dapat menimbulkan suatu malapetaka, hal ini karena dengan melaksanakan pembangunan berarti melakukan aktivitas yang merubah lingkungan. Perubahan yang dihasilkan oleh pembangunan sebagian telah direncanakan dan sebagian lagi di luar perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan didapatkan kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup. kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah dan Swasta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pemerintahan | Swasta |
| 1 | Sosialisasi atau pelatihan | Menjaga area konservasi dilokasi |
| 2 | Menerapkan kebijakan yang dituangkan kedalam RPJMD | - |

**Inovasi dalam Perubahan Iklim dan Perbaikan Kualitas Lingkungan**

Sebagai pelaksana kebijakan daerah, Dinas Lingkungan Hidup hanyalah sebagai pelaksana teknis, selanjutnya seluruh kebijakan yang dibebankan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pelalawan, inovasi dalam peningkatan kapasitas lembaga dilakukan. Bentuk inovasinya berupa pengembangan jaringan dan peningkatan transparansi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pelalawan Tahun 2022, tercatat sebanyak 6.987 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan dengan berbagai bentuk badan hukum di antara berupa perseroan terbatas, CV/Firma, Koperasi dan Perorangan.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui beberapa hal sebagai berikut: 1) Sosialisasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten melalui Petugas Pengolah Informasi Daerah, di mana setiap OPD memberikan informasi pada website Kabupaten Pelalawan terkait rencana kerja program kegiatannya, realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan OPD, dan informasi lainnya dalam pelaksanaan tugas fungsi pemerintahan; 2) Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa seleksinya telah menggunakan sistem online menghindarkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme pada pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah; 3) Perizinan SPPL secara online dan pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup secara online https://dlh.pelalawankab.go.id/; dan pengurusan perizinan lingkungan (Amdal, UKL-UPL, dll) online melalui <https://dpmptsp.pelalawankab.go.id/>.

Dalam menghadapi perubahan iklim, seluruh pihak termasuk masyarakat perlu melakukan tindakan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap dampak yang ditimbulkan serta mitigasi untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Berikut ini diuraikan berbagai program untuk Inovasi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Kabupaten Pelalawan Tahun 2021, sebagai berikut : 1) Program Kampung Iklim 2) Normalisasi Sungai 3) Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi di TNTN. Dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Kabupaten Pelalawan membuat inovasi daerah berupa kebijakan dan program kegiatan**.** Adapun berbagai inovasi daerah yang telah dilakukan Kabupaten Pelalawan, yaitu: 1) Inovasi Sumur AKHLAG (Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut) 2) Kebijakan Pengendalian Kebakaran (Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2022 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Berbasis Klaster di Kabupaten Pelalawan) 3) Program Desa Bebas Api.

Dalam usaha perkebunan kelapa sawit, masyarakat Kabupaten Pelalawan cenderung masih terfokus dalam pemanfaatan buat (TBS) saja, sedangkan untuk bagian tanaman lainnya cenderung terabaikan dan menjadi limbah. Atas kondisi ini muncul ide dan gagasan dari salah seorang warga masyarakat Pelalawan yaitu warga Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan bernama Bapak Suranto. Bapak Suratno menciptakan suatu mesin atau alat yang dapat memisahkan daun kelapa sawit dari lidinya yang disebut mesin peraut lidi kelapa sawit. Tujuannya agar lidi-lidi kelapa sawit dapat dimanfaatkan menjadi barang bernilai ekonomis tinggi seperti kerajinan. Mengapa dipilih lidi kelapa sawit, dikarenakan lidi kelapa sawit menjadi salah satu bahan pokok yang dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam kerajinan dan memiliki nilai fungsi tinggi jika dikelola dengan baik. Proses pengelolaannya pun cenderung mudah.

Satu Kg lidi kelapa sawit dapat diolah menghasilkan 7 buah piring dengan harga jual Rp 7.000/Unit atau piring. Selain terbuka juga peluang usaha dan peluang kerja. Saat ini, masyarakat Desa Makmur mulai memasarkan mesin/alat peraudi keluar desa dan daerah dengan harga jual mesin Rp 6.000.000 per unitnya. Artinya dampak yang dihasilkan inovasi ini berupa :

1. Terbukanya peluang kerja dan usaha bagi kelompok ibu-ibu
2. Meningkatnya ekonomi masyarakat desa Makmur
3. Berkurangnya angka pengangguran di tingkat desa
4. Termanfaatkan limbah pelepah dan daun kelapa sawit dengan baik

Inovasi Pemerintah Daerah Lainnya (Program Indah – Dpmtsp Kabupaten Pelalawan) dalam program Izin usaha, suatu bentuk persetujuan izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha, setiap pelaku usaha wajib untuk memiliki izin usaha. Sejalan dengan hal tersebut, DPMPTSP Kabupaten Pelalawan menghadirkan inovasi untuk memudahkan pengurusan izin usaha bagi masyarakatnya. Program tersebut dinamai dengan Izin Itu Mudah atau disingkat dengan sebutan INDAH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan didapatkan kebijakan dan program pengelolaan lingkungan hidup. Inovasi yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 4

**Tabel 4. Inovasi yang sudah digunakan dalam pengelolaan lingkungan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Inovasi yang sudah digunakan dalam pengelolaan lingkungan | | |
| Jenis | Tujuan | Tahapan |
|  | Program pelalawan sejuk | Mempermudah, mempercepat informasi | Pengembangan |
|  | Pembangunan sistem informasi | - | - |

Usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari: kepala daerah, anggota DPRD, ASN, perangkat daerah; dan anggota masyarakat.

**Tabel 5. Pemahaman dan usaha inovasi dalam pengelolaan lingkungan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pemahaman dan usaha inovasi dalam pengelolaan lingkungan | |
| Pemahaman dan usaha inovasi dari aspek kelayakan ekonomi | Pemahaman dan berdasarkan permasalahan |
|  | Pelalawan sejuk | Persampahan, penurunan kualitas bersih, banjir dan alih fungsi lahan |
|  | Bak sampah dan kompos | Penurunan keanekaragaman hayati |

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Pusat mendorong agar jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, diwajibkan melakukan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan terlebih dahulu menyusun roadmap. Secara umum inovasi daerah yang terdapat di Kabupaten Pelalawan sudah dilakukan dalam pengelolaan lingkungan namun perlu ditambah dengan inovasi lainnya terutama dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Inovasi di Kabupaten Pelalawan masih terbatas dengan jumlah bilan dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Kabupaten Bogor. Perkembangan indeks inovasi daerah Kabupaten Bogor mengalami peningkatan sebesar 50% pada tahun 2019, dibanding tahun sebelumnya 4.280 poin menjadi 6.420 poin di tahun 2019. Kemudian, peningkatan yang sangat signifikan pun terjadi di tahun 2020 sebesar 104,74%, dari 6.420 poin menjadi 13.144 poin.

# Kesimpulan

Permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang terdapat di Kabupaten Pelalawan secara umum terkait dengan alih fungsi lahan, banjir, abrasi dan sedimentasi serta pendangkalan sungai dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan di Kabupaten Pelalawan terkait dengan permasalahan tersebut sudah dilakukan dengan berbagai regulasi dan pengaturan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan.

Inovasi-inovasi daerah dalam menanggulangi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan terdiri dari inovasi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kemudahan izin, pembuatan sumur sedangkan inovasi dari masyarakat berupa mesin peraut lidi sawit sedangkan dari pihak swasta dengan program CSRnya mulai dari Desa Bebas Api, Proklim dan lain sebagainya.

Keberhasilan inovasi-inovasi tersebut dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan sudah terlihat dan dirasakan oleh masyarakat baik terkait dengan program pemerintah maupun yang sudah dilakukan oleh masyarakat namun secara kuantitatif masih kurang dibandingkan dengan kabupaten lainnya

**Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan ini, dimana dalam penulisan ini banyak sekali yang berpartisipasi dalam melakukan penelitian ini.

**Daftar Pustaka**

BPS [Badan Pusat Statistik] Kabupaten Pelalawan. 2021. Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, Pelalawan.

BPS [Badan Pusat Statistik] Kabupaten Pelalawan. 2022. Kabupaten Pelalawan Dalam Angka Tahun 2022. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, Pelalawan.

BPBD [Badan Penanggulangan Bencana Daerah] Kabupaten Pelalawan. 2022. Luas Wilayah Terjadinya Kebakaran Lahan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2022. BPBD Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci.

Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategis Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pemerintah Kabupaten Pelalawan. 2021. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2031. Pemkab Pelalawan, Pangkalan Kerinci.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Kabupaten Pelalawan 2022.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Pelalawan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Kabupaten Pelalawan 2022

Pusat Data Dan Informasi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 62 ayat 1-3